BAB II

PENGATURAN HUKUM MENGENAI NARKOTIKA DAN ANAK

A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Narkotika

1. Undang-Undang Narkotika (UU No.35 Tahun 2009)
 - a. Sejarah pembentukan undang-undang narkotika.

Kebijakan penanggulangan dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda dengan dikeluarkannya ordonansi obat bius dan candu (*Verdoovende Middelen Ordonantie*, Stbl 1927 Nomor 278 jo Nomor 536. Pada awal tahun 1970 penyalahgunaan narkotika sudah semakin sering terjadi dalam masyarakat dan jenis-jenis narkotika yang beredar pun semakin beragam, kenyataan ini menimbulkan kesadaran perlunya suatu undang-undang yang dapat menjangkau setiap penyalahgunaan narkotika, selain itu bahwa ketentuan dalam V.M.O Stbl 1927 Nomor 278 jo Nomor 536 tidak lagi memenuhi syarat sebagai undang-undang narkotika dan kenyataan bahwa tidak cocok lagi dengan administrasi pengadilan pidana.⁹

Maka pada tanggal 8 September 1971 Presiden lalu mengeluarkan Instruksi Presiden No.6 Tahun 1971 kepada Kepala Bakin yang pada prinsipnya memerintahkan Kepala Bakin untuk memberantas masalah-masalah yang menghambat pembangunan nasional, salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika.¹⁰

⁹ M. Taufik Makarao. Suhasril dan H.M Zakky A.S. Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2005. h. 10

¹⁰ *Ibid.* h. 11

Khusus dalam masalah penyalahgunaan narkotika ketentuan hukum yang sudah ada belum dapat menjangkaunya, sebab ketentuan-ketentuan yang masih lama memiliki beberapa kelemahan, antara lain:¹¹

1. Tidak adanya keseragaman dalam pengertian narkotika.
2. Sanksi yang terlalu ringan dibanding dengan penyalahgunaan narkotika .
3. Ketidaktegasan dalam pemberantasan penjual, pemilik, pemakai, pengedar dan penyimpan narkotika.
4. Ketidak serasian antara ketentuan hukum pidana mengenai narkotika.
5. Belum adanya badan bertingkat nasional yang khusus menangani masalah penyalahgunaan narkotika .
6. Belum ada ketentuan khusus wajib lapor dalam kasus penyalahgunaan narkotika.
7. Belum adanya hal-hal yang khusus bagi yang berjasa dalam penyelidikan perkara penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan hal tersebut, kemudian pemerintah mengundangkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3086 dan dinyatakan berlaku sejak 26 Juli 1976, dalam perkembangan terakhir, undang-undang ini pun diganti dengan Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang diundangkan pada tanggal 1 September 1997 dalam Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3698 dan berlaku sejak undang-

¹¹ *Ibid.* h. 12

undang tersebut diundangkan. Lahirnya undang-undang tentang narkotika yang baru ini didahului dengan keluarnya Undang-Undang No.7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988. Kemudian karena tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, dan teknologi canggih, sehingga UU No.22 tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi, maka Undang-Undang tersebut diganti dengan UU No.35 Tahun 2009 yang diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5062.

b. Kaidah pidana di bidang narkotika.

Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika disamping mengatur penggunaan narkotika, juga mengatur secara khusus ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Bab XII Pasal 78 sampai dengan Pasal 100 yang berjumlah 23 pasal. Semua tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan, alasannya adalah bahwa narkotika dipergunakan untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah.¹² Dari ketentuan-ketentuan pidana tersebut maka pengelompokan kejahatan di bidang narkotika adalah:

¹² *Ibid.* h. 198

1. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika.

Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika bukan hanya perbuatan yang memproduksi narkotika saja melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu, berupa mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkotika untuk semua golongan, diatur dalam Pasal 80.¹³

2. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transit narkotika.

Kejahatan narkotika ini dalam arti luas termasuk dalam perbuatan membawa, mengirim dan mentransit narkotika, diatur dalam Pasal 81. Kemudian masih ada tindak pidana di bidang pengangkutan narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 93.¹⁴

3. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika.

Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika disini maksudnya bukan hanya jual beli dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor, impor dan tukar menukar narkotika, diatur dalam Pasal 82. Dalam tindak pidana narkotika ini perbuatan menyalurkan dan menyerahkan narkotika juga termasuk dalam perbuatan jual beli narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32.¹⁵

¹³ *Ibid.* h. 200

¹⁴ *Ibid.* h. 204

¹⁵ *Ibid.* h. 201

4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika.

Dalam kejahatan ini oleh undang-undang dibedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai narkotika golongan II dan III, karena golongan narkotika tersebut memiliki fungsi dan akibat yang berbeda. Untuk tindak pidana menguasai narkotika golongan I diatur dalam Pasal 78, sedangkan untuk golongan II dan III diatur dalam Pasal 78.¹⁶

5. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I, golongan II dan golongan III dibedakan atas dua macam, yaitu penyalahgunaan narkotika untuk orang lain dan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap orang lain diatur dalam Pasal 84, sedangkan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri diatur dalam Pasal 85.¹⁷

6. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika.

Undang-undang narkotika menghendaki agar pecandu narkotika melaporkan diri atau keluarganya yang melaporkan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 46. Kewajiban tersebut apabila tidak dilakukan merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali yang bersangkutan, yang diatur dalam Pasal 86.¹⁸

¹⁶ *Ibid.* h. 206

¹⁷ *Ibid.* h. 209

¹⁸ *Ibid.* h. 210

7. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika.

Seperti diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 41, kemudian untuk dapat dipublikasikan harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau pada media cetak ilmiah farmasi. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka terjadi kejahatan narkotika yang menyangkut label dan publikasi yang diatur dalam Pasal 89.¹⁹

8. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika.

Yang dimaksud dengan proses peradilan meliputi pemeriksaan perkara di tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Sehingga perbuatan yang menghalang-halangi atau mempersulit jalannya proses peradilan yang bertujuan untuk proses peradilan tidak lancar atau tidak jadi sama sekali merupakan tindak pidana, diatur dalam Pasal 92. Perbuatan menghalangi-halangi dapat dilakukan di semua tingkat pemeriksaan yang dilakukan oleh siapa saja, sedangkan perbuatan mempersulit dilakukan ketika pemeriksaan perkara sedang berlangsung yang dilakukan oleh orang yang sedang diperiksa oleh petugas atau pejabat pemeriksa.²⁰

9. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika.

Dalam perkara narkotika ada kemungkinan bahwa barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak

¹⁹ *Ibid.* h. 212

²⁰ *Ibid.* h. 213

mungkin barang bukti tersebut diajukan ke persidangan semuanya. Berdasarkan Pasal 71 barang bukti yang demikian dilakukan penyisihan yang wajar dan selebihnya barang bukti itu dimusnahkan yang dibuat dan dimasukkan dalam berkas berita acaranya. Apabila tidak dilakukan maka melanggar Pasal 94.²¹

10. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu.

Sebelum seorang saksi memberikan keterangan dimuka sidang persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana maka ia wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya. Dengan cara ini diharapkan saksi memberikan keterangannya selalu konsekuen. Dan apabila dalam perkara narkoba saksi tidak memberikan keterangan dengan benar dapat dipidana, diatur dalam Pasal 95.²²

11. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga.

Lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang narkoba untuk memproduksi, menyalurkan atau menyerahkan narkoba yang ternyata melakukan kegiatan narkoba tidak sesuai dengan tujuan penggunaan narkoba sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang, maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana, diatur dalam Pasal 99.²³

12. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur.

²¹ *Ibid.* h. 214

²² *Ibid.* h. 215

²³ *Ibid.* h. 217

Kejahatan di bidang narkoba tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun). Anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba, karena jiwanya belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis. Oleh karena itu diatur dalam Pasal 87.²⁴

Selain itu ada kemungkinan bahwa warga negara Indonesia yang bepergian ke luar negeri ataupun yang berada diluar negeri melakukan kejahatan narkoba dan setelah melakukan perbuatannya itu yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Dalam hal ini undang-undang narkoba akan selalu mengikuti warga negara Indonesia kemana saja perginya, namun karena dalam Pasal 97 diatur bahwa ketentuan dalam undang-undang tersebut hanya dapat diberlakukan setelah pelakunya pulang ke tanah air.²⁵

Selain mengatur penggolongan kejahatan di bidang narkoba, undang-undang ini sudah mengenal ancaman pidana minimal yang dimaksudkan untuk pemberatan hukuman apabila tindak pidananya:²⁶

- 1) Didahului dengan permufakatan jahat, diatur dalam Pasal 78 ayat (2) sampai dengan Pasal 82.
- 2) Dilakukan secara terorganisasi jahat diatur dalam Pasal 78 ayat (3) sampai dengan Pasal 92.

²⁴ *Ibid.* h. 218

²⁵ *Ibid.* h. 219-220

²⁶ Nawawi Arief Barda. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Kencana. Jakarta. 2008. h. 207

- 3) Dilakukan oleh korporasi diatur dalam Pasal 78 ayat (4) sampai dengan Pasal 82.
 - 4) Dilakukan oleh residivis diatur dalam Pasal 96.
2. Undang-Undang Psikotropika (UU No.5 Tahun 1997)
- a. Sejarah pembentukan undang-undang psikotropika

Pengaturan psikotropika yang pertama kali diatur dalam Stb1949 No. 419 tanggal 22 Desember 1949 tentang Sterkwerkendegeneesmiddelen Ordonantie yang dalam terjemahannya adalah Ordonansi Obat Keras. Psikotropika tidak diatur secara tersendiri, masih disatukan dalam pengaturan bahan baku obat atau obat jadi lainnya yang termasuk dalam obat keras (Daftar G). Kemudian pada tanggal 2 April 1985 keluar Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 213/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Obat Keras Tertentu yang mencabut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 10381/A/SK/1972. dalam peraturan mengenai obat keras tertentu dalam Lampiran I terdapat obat-obatan tertentu yang dilarang untuk diimpor, diproduksi, didistribusikan, menyimpan dan menggunakannya.

Obat-obatan tersebut antara lain adalah etisiklidina, fenmetrazin, lisergida (LSD) dan spilosibin. Sedangkan dalam Lampiran II antara lain Phenobarbital dan benzodiazepine serta turunannya yang dalam hal mengimpor, memproduksi serta mendistribusikannya diatur secara ketat dan harus dilaporkan. Pada tanggal 8 Pebruari 1993 dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor 124 / Men.Kes / Per / 1993 tentang Obat Keras Tertentu yang merupakan perbaikan dan penambahan terhadap peraturan menteri kesehatan sebelumnya. Dalam peraturan ini juga melampirkan Lampiran I dan Lampiran II, namun belum ada mencantumkan ketentuan pidananya. Sehingga putusan pengadilan terhadap kasus-kasus psikotropika (ekstasi) tidak ada ketegasan dari segi hukum pidananya, sebab peraturan menteri kesehatan dianggap kurang kuat sebagai dasar hukumnya. Kemudian pada tahun 1992, pemerintah mengundang Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang dalam salah satu pasalnya yakni dalam Pasal 44 pada pokoknya disebutkan pengamanan, penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungannya. Untuk itu baik produksi, peredaran dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar atau persyaratan yang ditentukan.²⁷ Baru kemudian pada tanggal 11 Maret 1997 pemerintah mengundang Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1997 No.10, Tambahan Lembaran Negara RI No.3671 yang mulai berlaku sejak diundangkan.²⁸ Pembentukan undang-undang ini tidak dapat dilepaskan dari adanya konvensi-konvensi sebagai berikut:

²⁷ Hari Sasangka. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung. 2003. h. 122-124

²⁸ Gatot Supramono. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan. Jakarta. 2004. h. 15

- 1) Pembentukan undang-undang ini tidak dapat dilepaskan dari adanya konvensi-konvensi sebagai berikut: Konvensi Psikotropika 1971 (Convention on Psychotropic Substances 1971) yang diratifikasi dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1996, dan
- 2) Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988) yang diratifikasi dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1997.²⁹

b. Kaidah Pidana di Bidang Psikotropika

Undang-undang psikotropika secara khusus mengatur ketentuan pidana berjumlah 14 pasal, pada Bab XIV Pasal 59 sampai Pasal 72 dimana seluruh perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana merupakan kejahatan (Pasal 68). Tindak pidana di bidang psikotropika antara lain berupa memproduksi, atau mengedarkan secara gelap, maupun penyalahgunaan psikotropika.³⁰ Dari seluruh tindak pidana yang diatur dalam undang-undang psikotropika dilihat dari segi bentuk perbuatannya maka dapatlah dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

- 1) Kejahatan yang menyangkut produksi psikotropika yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b, Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 60 ayat (1).

²⁹ Hari Sasangka. Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana. Mandar Maju. Bandung. 2003. h. 123

³⁰ Gatot Supramono. Hukum Narkoba Indonesia. Djambatan. Jakarta. 2004. h. 65

- 2) Kejahatan yang menyangkut peredaran psikotropika yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c dan Pasal 60 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- 3) Kejahatan yang menyangkut ekspor dan impor psikotropika yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d, Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 63 ayat (1).
- 4) Kejahatan yang menyangkut penguasaan psikotropika yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e, Pasal 62 ayat (1) huruf a.
- 5) Kejahatan yang menyangkut penggunaan psikotropika yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a.
- 6) Kejahatan yang menyangkut pengobatan dan rehabilitasi psikotropika yang diatur dalam pasal 64.
- 7) Kejahatan yang menyangkut label dan iklan psikotropika yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.
- 8) Kejahatan yang menyangkut transito psikotropika yang diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- 9) Kejahatan yang menyangkut pelaporan kejahatan di bidang psikotropika yang diatur dalam Pasal 65.
- 10) Kejahatan yang menyangkut sanksi dalam perkara psikotropika yang diatur dalam Pasal 66.
- 11) Kejahatan yang menyangkut pemusnahan psikotropika yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) huruf d.

Selain mengatur tentang jenis-jenis kejahatan dibidang psikotropika, undang-undang psikotropika ini juga mengatur tentang pembantuan dan percobaan (Pasal 69), permufakatan jahat diperberat 1/3 (Pasal 71 ayat 2), hukuman terhadap korporasi (Pasal 70) serta hukuman yang diperberat 1/3 terhadap residivis (Pasal 72).³¹

B. Pengaturan Hukum yang Berkaitan dengan Anak

1. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No.23 tahun 2002)

a. Upaya Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memerlukan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha

³¹ Nawawi Arief Barda. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Kencana. Jakarta. 2008. h. 207

perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang mengakibatkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya.

Upaya perlindungan hukum anak pada prinsipnya sudah lama diupayakan oleh pemerintah, hal ini terbukti dari berbagai peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh pemerintah. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut antara lain adalah UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mengatur perlindungan hukum terhadap setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana termasuk juga bagi anak, UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang memuat ketentuan hukum pidana formil dan ketentuan hukum pidana materiil terhadap anak, UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 59 sampai Pasal 66 dan secara khusus dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³²

Ketika menetapkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI tahun 2002 No 19, Tambahan Lembaran Negara RI No 4235 dan diundangkan tanggal 22 Oktober 2003 pemerintah menyandarkan sejumlah asumsi mengapa disusun undang-undang ini.³³ Alasan diundangkannya undang-undang ini diantaranya adalah sebagai berikut:

³² Lilik Mulyadi.. Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi. Djambatan. Jakarta. 2004. h. 50

³³ Muladi. Hak Asasi Manusia- Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Perspektif Hukum & Masyarakat. Refika Aditama. Bandung. 2005. h. 232-233

- 1) bahwa negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; Alasan diundangkannya undang-undang ini diantaranya adalah sebagai berikut:
- 2) bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- 3) bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- 4) bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial dan berahlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Undang-undang perlindungan anak ini mengandung beberapa pasal mengenai perlindungan terhadap anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban kejahatan. Pada bagian Kelima tentang Perlindungan Khusus Pasal 59 dinyatakan bahwa:

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan / atau seksual, anak yang

diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Sedangkan dalam Pasal 64 ayat (1) memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi pelaku atau yang sedang konflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Adapun yang termasuk dalam perlindungan khusus yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana menurut Pasal 64 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. penyediaan petugas perlindungan sejak dini.
- c. penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan
- g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

b. Kaidah Pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pemerintah telah mengatur tentang ketentuan pidana, yaitu yang terdapat dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 90. Apabila diperinci maka ketentuan

pidana dalam undang-undang ini ditinjau dari segi perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) menggunakan jenis-jenis perumusan kumulatif dan kumulatif alternatif, sedangkan dari segi lamanya sanksi pidana maksimum (*strafmaat*) menggunakan sistem pidana maksimum dan sistem batas minimum / maksimum lamanya ancaman pidana.³⁴

Adapun perbuatan yang dapat dikenakan pidana menurut ketentuan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:³⁵

- 1) Dengan sengaja melakukan diskriminasi terhadap anak atau melakukan penelantaran terhadap anak, dapat dipenjara 5 tahun (Pasal 77).
- 2) Mengetahui dan sengaja membiarkan anak yang memerlukan pertolongan dapat dipenjara 5 tahun (Pasal 78).
- 3) Melakukan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat dihukum 5 tahun penjara (Pasal 79).
- 4) Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, yang dapat dibedakan atas (Pasal 80):
 - a) Melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan / atau denda Rp.72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).
 - b) Melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan bila anak luka berat dipidana dengan pidana penjara

³⁴ Lilik Mulyadi.. Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi. Djambatan. Jakarta. 2004. h. 77

³⁵ Rengena Purba. 2006. Peran Hakim Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Anak: Pidato Orasi Ilmiah Dies Natalis FH-USU.Fakultas Hukum USU. Medan. 2006. h. 12-13

- 5 (lima) tahun dan / atau denda Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- c) Melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan oleh orang tuanya dipidana dengan hukuman a, b, c ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).
 - d) Melakukan kekerasan terhadap anak dapat dipenjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, jika mengakibatkan luka berat hukumannya 5 (lima) tahun, jika mengakibatkan kematian diancam 10 (sepuluh) tahun penjara, jika pelakunya orang tua atau orang yang seharusnya melindungi anak hukumannya ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari ancaman hukuman diatas.
- 5) Dengan sengaja melakukan persetubuhan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) (Pasal 81).
- 6) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan pencabulan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) (Pasal 82).
- 7) Memperdagangkan, menjual atau menculik anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta

rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) (Pasal 83).

- 8) Melakukan transplantasi atau pengambilan organ dan / atau jaringan tubuh anak secara melawan hukum dapat dihukum 10 (sepuluh) tahun penjara dan / atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) (Pasal 84)
- 9) Melakukan jual beli organ tubuh dapat dipenjara 15 (lima belas) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) serta menjadikan anak sebagai objek penelitian tanpa izin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan anak dihukum 10 (sepuluh tahun) penjara dan / atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) (Pasal 85).
- 10) Membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauan sendiri dapat dipenjara , paling lama 5 (lima) tahun dan / denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) (Pasal 86)
- 11) Memperalat anak untuk kepentingan militer dapat dipenjara paling lama 5 (lima) tahun dan / denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) (Pasal 87)
- 12) Melakukan eksploitasi ekonomi maupun seksual terhadap anak dapat dihukum 10 (sepuluh) tahun penjara dan / atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) (Pasal 88).
- 13) Melibatkan anak dalam masalah narkoba dan psikotropika dapat dihukum paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 5 (lima)

tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan melibatkan anak dalam masalah alkohol dan zat adiktif lainnya dapat dihukum paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun penjara (Pasal 89).

- 14) Korporasi yang melakukan tindak pidana dalam hal-hal diatas dipidana pengurus dan / atau korporasinya dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 pidana denda (Pasal 90).

2. Undang-Undang Pengadilan Anak (UU No.3 Tahun 1997)

a. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pengadilan Anak

Peradilan adalah tiang teras dan landasan negara hukum. Peraturan hukum yang diciptakan memberikan faedah apabila ada peradilan yang berdiri kokoh/kuat dan bebas dari pengaruh apapun, yang sangat memberikan isi kekuatan kepada kaidah-kaidah hukum yang diletakkan dalam undang-undang dan peraturan hukum lainnya. Peradilan juga merupakan instansi yang merupakan tempat semua orang mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hak dan kewajibannya menurut hukum.

Hakekatnya pada masa penjajahan sampai dengan sebelum 3 Januari 1998 maka penagturan anak dalam ketentuan hukum pidana diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP. Dalam ketentuan KUHP tersebut pada hakekatnya pengadilan anak dilakukan terhadap anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun dimana terhadap

mereka hukuman yang dijatuhi adalah dikembalikan kepada orang tuanya / wali / pemeliharanya tanpa pidana apapun atau dijadikan anak negara. Jika dijadikan anak negara sampai berumur 18 (delapan belas) tahun dan bila dijatuhi pidana maka maksimum pidana pokoknya dikurangi 1/3 dan bila diancam pidana mati / seumur hidup maka lamanya pidana maksimal 15 (lima belas) tahun serta tidak menerapkan pidana tambahan.³⁶

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang terpenting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman yang sekaligus kepada masyarakat dan kepada sipelaku tindak pidana agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Sebagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan bukan hanya orang dewasa yang terjebak dalam pelanggaran norma, terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjerumus kearah tindakan pidana, seperti narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya.

Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental dan sosial sering berperilaku atau bertindak asosial dan bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga dan masyarakat. Didalam salah satu konsideran undang-undang pengadilan anak dinyatakan bahwa

³⁶ Lilik Mulyadi.. Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi. Djambatan. Jakarta. 2004. h. 8-9

anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan.³⁷

Oleh karena itu Mahkamah Agung dalam SEMA RI No.3 Tahun 1959 tanggal 15 Pebruari yang pada pokoknya menentukan bahwa demi kepentingan anak-anak maka disarankan pemeriksaan perkara anak-anak dengan pintu tertutup. Selanjutnya Mahkamah Agung dalam instruksinya Nomor: M.A / Pem. / 048 / 1971 tanggal 4 Januari 1971 pada pokoknya menentukan bahwa masalah anak wajib disalurkan melalui peradilan yang memberikan jaminan demi kesejahteraan anak dan masyarakat, sehingga disarankan hakim mempunyai pengetahuan, perhatian dan dedikasi terhadap anak. Kemudian dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.06-UM.01.06 Tahun 1983 tentang tertib sidang dan tata ruang sidang yang pada pokoknya menentukan bahwa sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal dengan pintu tertutup dan putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Peraturan ini kemudian disempurnakan dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.03-UM.01.03 Tahun 1991. Kemudian pemerintah setelah melalui proses yang panjang sejak diajukannya rancangan undang-undang ini sekitar tahun 1970-an, mengundang Undang-Undang No.3 Tahun 1997,

³⁷ Bambang Waluyo. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika. 2004. h. 3

Lembaran Negara RI Nomor 3 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3668 yang dinyatakan berlaku sejak 3 Januari 1998.³⁸

b. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Anak

Pengadilan anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Meskipun sebagai peradilan khusus pengadilan anak tetap dalam lingkungan peradilan umum. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi. Pada setiap badan tersebut memiliki kekuasaan dan wewenang masing-masing dalam tugasnya menyelesaikan perkara. Dalam suatu lingkungan badan peradilan tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (difrensiasi / spesialisasi), misalnya dalam Pengadilan Umum dapat diadakannya pengkhususan dengan undang-undang berupa Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi dan sebagainya.³⁹ Undang-undang pengadilan anak yang tertuang dalam UU No.3 Tahun 1997 mengatur banyak hal kekhususan, antara lain sebagai berikut:⁴⁰

³⁸ Lilik Mulyadi.. Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi. Djambatan. Jakarta. 2004. h. 9-11

³⁹ Donny M Doloksaribu, 2007. Skripsi: Analisa Hukum dan Kriminologi Terhadap Kasus Kejahatan Sodomi di Medan. Fakultas Hukum-USU. Medan. hlm 78

⁴⁰ Bambang Waluyo. Pidana dan Pidanaaan. Jakarta: Sinar Grafika. 2004. h. 103-105

1. Batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak nakal sekurang kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Aparat penegak hukum yang berperan dalam proses peradilan anak yaitu penyidik anak, penuntut umum adalah penuntut umum anak, hakim adalah hakim anak.
3. Hakim, penuntut umum, penyidik dan penasihat hukum serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.
4. Untuk melindungi kepentingan anak pada prinsipnya pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup. Kecuali dalam hal tertentu dapat dilakukan dalam sidang terbuka, misalnya dalam perkara pelanggaran lalu lintas dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara.
5. Pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan hanya yang ditentukan dalam undang-undang ini.
6. Ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana / anak nakal, antara lain sebagai berikut:
 - a) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
 - b) Apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
 - c) Apabila belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara

seumur hidup maka anak nakal tersebut dijatuhi tindakan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

- d) Apabila belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup maka anak nakal tersebut dijatuhi salah satu tindakan.
- e) Pidana kurungan yang dapat dijatuhi paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.
- f) Pidana denda yang dapat dijatuhi paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
- g) Apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja dan lama latihan kerja paling lama 90 hari dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.
- h) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim paling lama 2 (dua) tahun.